

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN JOKOWI DALAM KASUS BUDI  
GUNAWAN DI REPUBLIKA ONLINE**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:

Nailatus Sukriya

NIM. 11210066

Pembimbing :

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M. A.

NIP 19661209 199403 1 004

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/148/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PEMBERITAAN JOKOWI DALAM KASUS BUDI GUNAWAN DI  
REPUBLIKA ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILATUS SUKRIYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 11210066  
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Januari 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hamdan Dty., M.Si., M.A.  
NIP. 19661209 199403 1 004

Penguji II

Drs. Abdul Rozak, M.Pd  
NIP. 19671006 199403 1 003

Penguji III

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si  
NIP. 19840307 201101 1 013

Yogyakarta, 21 Januari 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515856  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nailatus Sukriya

NIM : 11210066

Judul Skripsi : Konstruksi Pemberitaan Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan di  
Republika Online

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqoyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Januari 2016

Ketua Jurusan



Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19710328 199703 2 001

Pembimbing

Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.  
NIP. 19661209 199403 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatus Sukriya  
NIM : 11210066  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Konstruksi Pemberitaan Jokowi Dalam Kasus Budi Gunawan Di Republika Online” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2016

Yang menyatakan,



Nailatus Sukriya  
NIM. 11210066

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, sehingga karya sederhana ini mampu terselesaikan

Kakak dan adik-adik ku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Keluarga UKM JQH Al-Mizan

Keluarga Rasida FM

Keluarga Adari

Sahabat-sahabat KPI 2011

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Motto**

“Dan Janganlah kamu menjatuhkan  
dirimu sendiri dalam kebinasaan”

Al-baqoroh 195



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada peneliti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan di Republika Online”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahan di muka bumi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjanah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. selaku pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Anisah Indriati selaku dosen penasehat akademik.

6. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Saudara-saudaraku (mbak Laila, Fikri, Rizki, Rizka dan dik Jarir) yang selalu menciptakan keceriaan serta memberikan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat KPI terbaikku Marti, Lulus, Tikha, Ima, Bibi, Denok Ida, Akbar, Zaky serta semua sahabat KPI 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk canda tawa yang selalu menghiasi perjuangan kita.
9. Seluruh keluarga besar UKM JQH Al-Mizan Retno, Faiz, Haidar, Etik, Manan, Hudi, Aisyah, Irfan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persat. Trimakasih telah menjalin ikatan persaudaraan di kota istimewa ini.
10. Seluruh keluarga besar RASIDA FM Mas Kamal, Mas Vedy, Mas Jay, Mb ersa, Mb Asya, Mas Miftah, Mas Lukman, Dinda, Dupi, Iyun
11. Seluruh keluarga besar IKAPMAM JOGJA Levi, Shofa, Laili, Asfi dan seluruh keluarga IKAPMAM yang tidak bisa disebutkan satu persatu
12. Seluruh keluarga besar KPMBY
13. Seluruh keluarga Playon
14. Keluarga Adari Rara, Amel, Iim, Adah, Ida yang sudi mendengar celotehan dan keluh kesah kepada penulis.

15. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tanpa kalian semua penulis tidak mungkin sampai seperti saat ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, khususnya bagi peneliti sendiri. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk melengkapi kekurangan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Januari 2016

Penyusun



Nailatus Sukriya

## ABSTRAK

Nailatus Sukriya11210066. *Konstruksi Pemberitaan Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan di Republika Online* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Keputusan Jokowi mengangkat Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan jenderal Sutarnan menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan tidak dilibatkannya KPK dalam proses seleksi sedangkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Media lantas menjadikannya sebagai topik penting dan menarik yang secara berkala terus diberitakan. Pemberian makna dalam setiap pemberitaan diberbagai media pastilah berbeda. hal ini karena setiap media tak terkecuali *Republika Online* memiliki ideologi masing-masing untuk mengkonstruksi sebuah fakta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi yang dibentuk *Republika Online* melalui pemberitaan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan dengan menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang memiliki empat struktur yakni sintaksis (cara wartawan menyusun berita), skrip (cara wartawan mengisahkan berita), tematik (cara wartawan menuliskan berita) dan retorik (cara wartawan menekankan berita). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Republika Online* memberikan pemaknaan atau konstruksi terhadap Presiden Jokowi sebagai presiden yang tidak memihak kepada rakyat, presiden yang tidak menepati janji dan kurang bijak dalam menyikapi kasus Budi Gunawan lantaran tidak dilibatkannya KPK dalam proses seleksi.

*Kata kunci: Republika Online, Jokowi dalam kasus Budi Gunawan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: PEMBERITAAN JOKOWI DALAM KASUS BUDI GUNAWAN DI REPUBLIKA ONLINE</b> .....	<b>20</b>
A. Profil SKH Republika .....	20
B. Pemberitaan Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan di Republika Online .....	24
<b>BAB III: FRAMING REPUBLIKA ONLINE DALAM PEMBERITAAN JOKOWI DALAM KASUS BUDI GUNAWAN</b> .....	<b>28</b>

<b>A. Analisis Framing Berita Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan .....</b>	<b>28</b>
1. Jokowi Benarkan Tunjuk Budi Gunawan jadi Kapolri Berita Edisi 10 Januari 2015 .....	28
2. Jokowi tak Libatkan KPK dalam Seleksi Kapolri, ini Jawaban Istana Berita Edisi 11 Januari 2015 .....	33
3. Pemilihan Kapolri Hak Prerogatif Presiden Berita Edisi 11 Januari 2015 .....	40
4. Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi-Bagi Kekuasaan? Berita Edisi 11 Januari 2015 .....	48
5. Jokowi Angkat Bicara Soal Pengajuan Budi Gunawan Berita Edisi 11 Januari 2015 .....	54
6. Keputusan Jokowi Soal Calon Kapolri Menuai Penolakan Berita Edisi 11 Januari 2015 .....	60
7. Jokowi Paparkan Proses Pilih Budi Gunawan Berita Edisi 14 Januari 2015 .....	66
8. “Zaman ZBY, Menteri Tersangka Dicapot. Lha ini?” Berita Edisi 15 Januari 2015 .....	71
9. Relawan Konser Dua Jari Kirim Surat Terbuka ke Jokowi Berita Edisi 15 Januari 2015 .....	77
10. Presiden Ambil Langkah Bijak Berita Edisi 16 Januari 2015 .....	83
11. Jokowi Tunda Pelantikan, JK Singgung Pemakzulan Berita Edisi 17 Januari 2015 .....	89
12. Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG Berita Edisi 03 Februari 2015 .....	95
13. Syafii Maarif: Presiden Menyatakan Budi Gunawan Batal Dilantik Berita Edisi 04 Februari 2015 .....	100
<b>B. Hasil Analisis Framing Berita Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan .....</b>	<b>103</b>
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep <i>Framing</i> Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki .....	18
Tabel 2. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi Benarkan Tunjuk Budi Gunawan Jadi Kapolri” Edisi 10 Januari 2015 .....	28
Tabel 3. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi tak Libatkan KPK dalam Seleksi Kapolri, Ini Jawaban Istana” Edisi 11 Januari 2015 ....	33
Tabel 4. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Pemilihan Kapolri Hak Prerogatif Presiden” Edisi 11 Januari 2015 .....	40
Tabel 5. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi-Bagi Kekuasaan?” Edisi 11 Januari 2015 .....	48
Tabel 6. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi Angkat Bicara Soal Pengajuan Budi Gunawan” Edisi 10 Januari 2015 .....	54
Tabel 7. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Keputusan Jokowi Soal Calon Kapolri Menuai Penolakan” Edisi 11 Januari 2015 .....	60
Tabel 8. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi Paparkan Proses Pilih Budi Gunawan” Edisi 14 Januari 2015 .....	66
Tabel 9. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Zaman SBY, Menteri Tersangka Dicopot. Lha Ini?” Edisi 14 Januari 2015 .....	71
Tabel 10. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Relawan Konser Dua Jari Kirim Surat Terbuka ke Jokowi” Edisi 15 Januari 2015 .....	77
Tabel 11. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Presiden Ambil Langkah Bijak” Edisi 16 Januari 2015 .....	83

Tabel 12. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi Tunda Pelantikan, JK Singgung Pemakzulan” Edisi 16 Januari 2015 .....	89
Tabel 13. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG” Edisi 03 Februari 2015 .....	95
Tabel 14. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Syafii Maarif: Presiden Menyatakan Budi Gunawan Batal Dilantik” Edisi 04 Februari 2015 .....	100
Tabel 15. Hasil Analisis Framing Jokowi dalam Kasus Budi Gunawan .....	103

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Beredarnya surat usulan penunjukan Budi Gunawan (BG) di dunia maya menggantikan jenderal Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang tertanggal 9 Januari 2015 dibenarkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi). Penunjukan mantan ajudan Megawati yang diduga memiliki rekening gendut berkaitan dengan penyerahan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke markas besar polisi republik Indonesia (mabes polri) pada tahun 2010 menuai pro dan kontra.<sup>1</sup> Isu tersebut lantas menjadi sorotan berbagai media, tak terkecuali media yang dikatakan senior dan memiliki kualitas yang tidak diragukan. *Kompas* dalam hal ini turut memberikan perhatiannya.

Seperti dikutip dari laman Kompas.com bahwa menurut Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, Jokowi terlihat terlalu memaksakan memilih calon Kapolri dalam waktu singkat, melihat masa jabatan Jendral Sutarman yang masih cukup panjang yakni pada oktober 2015. Selain itu, penunjukan tersebut tidak didahului penelusuran rekam jejak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pertimbangan untuk memilih calon kapolri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Budi gunawan Ajudan Megawati yang bakal jadi kapolri*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/09/nhx5qc-budi-gunawan-ajudan-megawati-yang-bakal-jadi-kapolri> diakses pada tanggal 26 juni 2015 pukul 10.11.

<sup>2</sup>Nadia kemala movanita, ambaranie “*pengamat : penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dipaksakan*”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/12/12565911/Pengamat.Penunjukan.Budi.Gunawan.sebagai.Calon.Kapolri.Dipaksakan%20di%20akses%20pada%2017.03.2015> pada tanggal 12 januari 2015 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal 17 ayat 2, Jokowi memang diperbolehkan bahkan disahkan untuk tidak meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. Namun isu terkait kepemilikan rekening gendut Budi Gunawan tidaklah bisa diabaikan begitu saja, melihat jabatan Kapolri merupakan ujung tombak penegak hukum. Meskipun berdasarkan Kopolnas BG dianggap layak karena dianggap sudah memiliki rekam jejak yang bersih, namun penunjukan tersebut tetap rawan terjadi kesalahpahaman sebelum adanya bukti tidak adanya keterlibatan calon terhadap isu tersebut.

Mengingat para pejabat di negeri ini yang sudah banyak melakukan tindak pidana korupsi, presiden seharusnya lebih berhati-hati dan lebih berupaya untuk mewujudkan keinginannya menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi, salah satunya yakni dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jajaran pejabat yang akan membantu presiden. Hal ini tentu dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Keterlibatan KPK dan PPATK yang merupakan tradisi baik pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenarnya sudah diterapkan oleh presiden Jokowi ketika memilih menteri, namun pada saat pemilihan calon Kapolri, tradisi baik tersebut ditanggalkan begitu saja. Hal ini lantas menjadi persoalan dan banyak menuai kritikan dari masyarakat, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) bahkan media.

Media sebagai kontrol sosial, melalui pemberitaannya terus menggulirkan berbagai berita terkait kebijakan tersebut hingga melebar. Kini media tidak hanya mempermasalahkan pihak-pihak yang pro dan kontra, melainkan membawa masalah baru yakni kisruh antara KPK – Polri dan tuduhan terhadap pimpinan partai pengusung Jokowi yakni (Megawati) yang dianggap melakukan tekanan politik terhadapnya.

*Republika Online* menyebut bahwa menurut ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pamula mendesak Jokowi untuk merdeka dalam bersikap. Harusnya, sebagai presiden Jokowi tidak terinversi oleh pihak manapun termasuk dari bayang Megawati Soekarnoputri.<sup>3</sup>

Tuduhan yang dikatakan oleh ketua IMM dalam berita yang dipublikasikan oleh *Republika Online*, seolah membenarkan bahwa fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan berita. Fakta atau realitas pada dasarnya dikonstruksi manusia membentuk dunia mereka sendiri.<sup>4</sup> Dengan pemahaman dan pemaknaan masing-masing pelaku jurnalis konstruksi media berusaha membangun, menyuguhkan, mempertahankan dan mereproduksi suatu peristiwa kepada pembacanya berdasarkan ideologi mereka, tak terkecuali *Republika Online*. Surat harian bernafaskan Islam inintentu mempunyai kacamata sendiri dalam mendefinisikan realita dan kemudian mengkonstruksikannya. oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana

---

<sup>3</sup> Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/05/nj9jar-jokowi-malah-terlihat-seperti-presiden-boneka> di akses pada 17 Maret 2015 pukul 10.25

<sup>4</sup> Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik*, (Yogyakarta : LKIS, 2002), hlm 22

konstruksi yang dibangun oleh *Republika Online* dalam pemberitaan Jokowi setelah mengangkat Budi Gunawan menjadi calon Kapolri.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana *Republika Online* mengkonstruksi berita Jokowi dalam kasus Budi Gunawan

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat konstruksi atau pemaknaan yang diberikan *Republika Online* terhadap berita Jokowi dalam kasus Budi Gunawan

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu Komunikasi (Jurnalistik) yang terkait dengan analisis *framing*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang konstruksi media, sehingga mampu menghasilkan dampak yang diinginkan khalayak. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam memaknai berita yang disuguhkan oleh media.

## E. Telaah Pustaka

Frame penolakan terhadap Front Pembela Islam oleh masyarakat Kalteng dalam surat kabar harian *Republika* edisi bulan Februari 2012, oleh Luqmanul Hakim Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas UIN Sunan Kalijaga tahun 2012. Penelitian ini berisi tentang kajian SKH *Republika* dalam memberitakan aksi penolakan masyarakat terhadap Front Pembela Islam atau FPI saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2012 dengan menggunakan analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan penelitian, SKH *Republika* tersebut mendukung aksi penolakan kunjungan FPI yang dilakukan masyarakat Kalteng<sup>5</sup>. Perbedaan penelitian yang dilakukan Lukmanul Hakim dengan penelitian ini adalah bagaimana *Republika Online* mengkonstruksi Pemberitaan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan.

Analisis pemberitaan Melinda Dee di *Detik.com*, *Majalah Tempo* dan *Metro TV* Nurul Hasfi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki berasumsi dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana

---

<sup>5</sup>Hakim Lukmanul, *Frame Penolakan Terhadap Front Pembela Islam oleh Masyarakat Kalteng dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan Februari 2012*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Dakwah, Universitas Sunan Kalijaga, 2012).

representasi MD dalam pemberitaan di ketiga media di atas. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat praktek jurnalistik bias gender yang dilakukan oleh ketiga media dan masing-masing platform memiliki ciri masing-masing yaitu: (1) Detik.com menggunakan narasumber sebagai kambing hitam (*spacegoat*) untuk mencela Melinda Dee (MD), (2) Wartawan atau editor Detik.com yang tertera di berita MD semuanya wartawan perempuan, (3) Gaya bahasa jurnalisme sastra digunakan Tempo untuk mendeskripsikan sensualitas MD, (4) Majalah Tempo lebih memilih karikatur untuk merepresentasikan MD dengan menggunakan foto-foto sensual MD, (5) Penyiar Metro TV berperan dalam representasi atas MD di televisi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasfi ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam segi metode analisis yang digunakan yakni framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.<sup>6</sup> Sedangkan perbedaan pada penelitian ini, terletak pada objek penelitian yang ingin melihat bagaimana *Republika Online* sebagai media Islam mengkonstruksi citra Jokowi dalam kasus Budi Gunawan.

Berita ucapan natal di *Republika Online* (Kajian isi berita melalui analisis framing) oleh Fatoni Shidiq jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Yogyakarta 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni Shidiq ini bertujuan untuk mengetahui *frame* atau konstruk berita yang dibangun oleh *Republika Online* pada berita

---

<sup>6</sup> Hasfi Nurul, *analisis framing pemberitaan melinda dee di Detikcom, majalah Tempo dan Metro TV*, (Yogyakarta : Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2011).

ucapan natal di tahun 2014 dengan menggunakan metode analisis model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan penelitian Fatoni Shidiq, *Republika Online* mengarahkan pembaca untuk ikut serta dalam pendapat memperbolehkan ucapan selamat natal.<sup>7</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, akan meneliti tentang bagaimana citra Jokowi dikonstruksi oleh *Republika Online* dalam kasus Budi Gunawan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Paradigma konstruksionis

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme ini diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Menurut Berger manusia dan masyarakat adalah produk dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus. Proses dialektis tersebut menurut Berger ada tiga tahapan.<sup>8</sup> Pertama, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses

---

<sup>7</sup>Shidiq Fatoni, *Berita ucapan natal di Republika Online (kajian isi berita melalui analisis framing)*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>8</sup>Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm 15-16

inilah dihasilkan sebuah dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.<sup>9</sup>

Kedua, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa, baik alat maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda maupun bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang. realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.<sup>10</sup>

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam

---

<sup>9</sup>Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm 16

<sup>10</sup>Ibid., 16-17

unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui interalisasi manusia menjadi hasil masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Fakta atau Peristiwa adalah Hasil konstruksi

Menurut pandangan konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini realitas tidak ada yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.<sup>12</sup>

Fakta atau realitas pada dasarnya dikonstruksi manusia membentuk dunia mereka sendiri. Dalam kata-kata terkenal dari Carey, realitas bukanlah sesuatu yang terberi seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi. Wartawan secara aktif memproduksi dan mendefinisikan dan memaknai suatu peristiwa. Dalam kata-kata ekstrem, realitas atau fakta tergantung pada bagaimana ia dilihat, pikiran dan konsepsi kitalah yang

---

<sup>11</sup>Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), 17

<sup>12</sup> Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm 22

membentuk dan mengkreasikan fakta, sehingga fakta yang sama bisa dilihat dan dimaknai secara berbeda.<sup>13</sup>

Realitas media bukanlah realitas yang ditulis dengan apa adanya sesuai dengan fakta atau peristiwa yang terjadi, tetapi ditulis dengan susunan kata yang menjadi sebuah cerita yang bermakna. Dalam proses pemilihan berita, realitas tidak hanya dilihat dengan apa adanya, melainkan dipahami dan dimaknai oleh seseorang atau wartawan berdasarkan faktor internal dan eksternal masing-masing, karena pada dasarnya realitas tidak berada dalam ruang kosong. Suatu peristiwa terjadi memiliki sebab, tujuan dan bahkan mungkin terjadi karena kepentingan tertentu baik perorangan atau golongan.

Hal ini sesuai dengan Peter L Berger dan Thomas Luckmann, seorang sosiolog yang pertama kali memperkenalkan konsep konstruksionis mengatakan, bahwa realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Pemahaman semacam ini realitas berwajah ganda atau plural. Seorang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu untuk menafsirkan realitas sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Eriyanto, *analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*, (Yogyakarta : LkiS, 2002),23-24

<sup>14</sup>Ibid., 18

### 3. Framing dan proses produksi berita

Framing bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita-kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak dibingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media yang secara langsung atau tidak mempengaruhi pemaknaan peristiwa. Wartawan hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan, pola kerja dan aktivitas masing-masing bisa terjadi institusi media itu yang mengontrol dalam pola kerja tertentu yang mengharuskan wartawan melihat peristiwa dalam kemasan tertentu, atau bisa juga terjadi wartawan sebagai bagian dari anggota komunitas menyerap nilai-nilai yang ada dalam komunitasnya. Logikanya hampir sama dengan kerja seorang dokter. Ketika gejala-gejala tertentu didiagnosi sebagai penyakit tertentu, pandangan semacam ini bukan hanya pendapat murni dari dokter, melainkan juga nilai-nilai profesional, etika, dan profesi kedokteran yang terserap dalam diri individu dokter. Demikian halnya dengan kerja wartawan. Wartawan hidup dan bekerja dalam suatu institusi yang mempunyai pola kerja, kebiasaan, aturan, norma, etika, dan rutinitas tersendiri. Semua elemen proses produksi berita tersebut mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami secara umum sebagai bagian dari

komunitas tertentu ia akan menyerap nilai-nilai kelompok dalam pandangan secara pribadi.

#### 4. Jurnalisme Online

Jurnalisme *Online* adalah gabungan antara internet dan kegiatan untuk memproduksi berita atau sebuah kisah melalui pemakaian fitur-fitur interaktif dalam internet. Fitur-fitur tersebut memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk menanggapi, berinteraksi, atau bahkan cerita-cerita tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber dan lain-lain melalui *hyperlinks*.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Syarifudin Yunus, media *online* dapat disamakan dengan pemanfaatan media dengan menggunakan perangkat internet. Media *online* sebagai salah satu jenis media massa tergolong memiliki pertumbuhan yang spektakuler. Bahkan saat ini, hampir sebagian masyarakat mulai dan sedang menggemari media *online*. Keberadaannya pun sudah sudah diperhitungkan banyak orang sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita.<sup>16</sup>

Informasi dan berita tersebut akan meningkat intensitasnya berkat teknologi internet. Internet sebagai media terbaru yang mengkonvergikan seluruh karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu.

---

<sup>15</sup>Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, (yayasanobor Indonesia, 2005), hlm 136-137

<sup>16</sup> Yunus Syarifudin, *Jurnalistik terapan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 32

Karena itu, apa yang berubah bukanlah substansinya melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya.

Perspektif ini didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap tidak berubah. Perubahan-perubahan ini ada dalam proses komunikasi yang bersifat khas. Karakteristik itulah yang menurut Asep Syamsul Romli sebagai keunggulan jurnalistik *online*<sup>17</sup>, berikut keunggulan dari jurnalisme online :

1. *Audience Control* atau kendali pembaca. Jurnalistik *online* memungkinkan pembaca (*use* atau *visitor*) leluasa dalam memilih berita yang diinginkan. Mereka bisa pindah dengan cepat dari satu berita ke berita lain atau dari satu portal berita ke website lain.
2. *Nonlinearity*. Jurnalistik *online* memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan. Pembaca bisa memulai dengan berita terbaru, bahkan bisa mulai dengan berita yang diposting satu-dua tahun lalu.
3. *Storage And Retrieval*. *Online* jurnalisme memungkinkan berita tersimpan, tersiapkan, atau terdokumentasikan dan diakses kembali dengan mudah oleh pembaca.
4. *Unlimited Space*. Ruang tanpa batas. Jurnalistik *online* relatif tanpa ada batasan jumlah berita atau informasi yang akan dipublikasikan,

---

<sup>17</sup> Syamsul M. Romli, asep, “jurnalisme online : jurnalisme masa depan”, diakses dari [http://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik Online - Jurnalistik Masa Depan](http://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik_Online_-_Jurnalistik_Masa_Depan) diakses pada 29 april 2015 pukul 08.08

juga relatif tanpa batasan jumlah huruf dan kata atau kalimat. Berbeda dengan media cetak yang dibatasi kolom atau halaman atau radio atau televisi yang dibatasi waktu.

5. *Immediacy. Kesegaran*, kecepatan. Jurnalisme *online* memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada pembaca, sebab internet adalah medium tercepat untuk menyebarkan informasi.
6. *Multimedia Capability*. Kemampuan multimedia. Jurnalisme *online* memungkinkan berita disampaikan tidak hanya dalam format teks, tapi bisa juga dilengkapi audio dan video.
7. *Interactivity*. Interaktivitas. Jurnalisme *online* memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca dalam setiap berita dengan adanya kolom komentar atau fasilitas media sosial yang memungkinkan pembaca menyebar atau membagi berita di akun media sosial.

## **G. Metode Penelitian**

Kata metodologi (*methodology*) dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berfikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dengan demikian metodologi penelitian menyangkut persoalan epistemologi pengetahuan (bagaimana pengetahuan diperoleh), yakni gejala atau realitas yang diteliti. Metodologi meliputi cara pandang dan prinsip berfikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang digunakan, prosedur ilmiah (metode) yang

ditempuh, termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.<sup>18</sup>

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah pemberitaan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan.

### **2. Subyek Penelitian**

Penelitian ini mengambil subyek media *Republika Online* edisi 10 Januari – 18 Februari 2015. Pada edisi tersebut *Republika online* ramai memberitakan penunjukan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut hingga pembatalan pelantikan BG oleh presiden Jokowi.

### **3. Bentuk dan Jenis Penelitian**

Bentuk dan jenis penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Analisis kualitatif ini bersifat induktif yang mempertimbangkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur kajian analisis. Data yang dikumpulkan dan diolah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sebagai suatu kepastian bagi sebuah penyimpulan keadaan laporan, penelitian akan berisi berbagai kutipan data untuk di deskripsikan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pawito, *penelitian komunikasi kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS, cetakan I, 2007), hlm 83

<sup>19</sup> Hikmat Mahi, *metode penelitian dalam prespektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta : graha ilmu, 2011), hlm 40

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama yang penulis ambil dari *Republika online* edisi 10 Januari 2015 – 18 Februari 2015. Sementara sumber data pelengkap adalah kumpulan buku, artikel, jurnal, dan skripsi mengenai penerapan kode etik jurnalistik dan konstruksi media.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dari berbagai metode tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup> Adapun perolehan data tersebut, penulis mengumpulkan beberapa berita diantaranya :

1. Jokowi Benarkan Tunjuk Budi Gunawan Jadi Kapolri
2. Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Seleksi Kapolri, ini Jawaban Istana
3. Pemilihan Kapolri Hak Prerogatif Presiden
4. Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi-Bagi Kekuasaan?
5. Jokowi Angkat Bicara Soal Pengajuan Presiden
6. Keputusan Jokowi Soal Calon Kapolri Menuai Penolakan
7. Jokowi Paparkan Proses Pilih Budi Gunawan
8. ‘Zaman SBY, Menteri Tersangka Dicapot. Lha ini?’

---

<sup>20</sup> Hikmat Mahi, *metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta : graha ilmu, 2011), hlm 83

9. Relawan Konser Dua Jari Kirim Surat Terbuka ke Jokowi
10. Presiden Jokowi Ambil Langkah Bijak
11. Jokowi Tunda Pelantikan, JK Singgung Pemakzulan
12. Jokowi Harus Segera Cari Pengganti BG
13. Syafii Maarif : Presiden Menyatakan Budi Gunawan Batal dilantik

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Model Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki yang menjabarkan sebuah model yang sangat detail dalam melihat sebuah pembedaan berita. Model ini melihat bagaimana wartawan menyusun berita, mengisahkan berita, menulis berita dan menekankan berita sehingga makna-makna yang tersimpan atau tersembunyi dalam suatu berita dapat diungkapkan. Makna-makna tersebut nantinya dapat digunakan penulis untuk melihat sejauh mana *Republika* menjunjung tinggi aspek keberimbangan berita.

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita. *Frame* berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Perangkat *framing* dalam pendekatan ini dibagi dalam empat struktur besar.

**Tabel 1**

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun berita	Skema Berita	<i>Headline</i> , <i>lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP Cara wartawan mengisahkan berita	Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menuliskan berita	Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti	Paragraf, proporsisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan berita	Leksikon Grafis Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto, 2002 :295

## H. Sistematika Pembahasan

**BAB I : Pendahuluan** pada bab ini berisikan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

**BAB II : Berita-berita tentang kasus Budi Gunawan** pada bab ini digambarkan bagaimana pemberitaan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan di Republika *online* dan bagaimana latar belakang pendirian Republika *online*.

**BAB III : Framing Pemberitaan Kasus Budi Gunawan** pada bab ini berisikan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M kosicki yang memiliki empat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Hasil analisis tersebut akan disajikan per berita.

**BAB IV : penutup** pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan hasil analisis peneliti serta saran untuk media dan penelitian selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis sesuai dengan metode analisis *framing* model Zhongdang dan Pan Gerald M. Kosicki, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Republika Online* memberikan pemaknaan kepada presiden Jokowi sebagai presiden yang tidak pro rakyat, presiden yang tidak menepati janji dan kurang bijak dalam menyikapi kasus Budi Gunawan lantaran tidak dilibatkannya KPK dalam proses seleksi.

Penilaian terhadap presiden Jokowi ini dapat dilihat dari berita yang berjudul 'Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi-Bagi Kekuasaan' dalam struktur skip dan tematik. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa penting bagi presiden Jokowi untuk melibatkan KPK yang dinilai sebagai lembaga yang kredibel dalam mengurus masalah korupsi, untuk membuktikan rekam jejak yang dimiliki Budi Gunawan.

Presiden yang tidak pro rakyat dapat dilihat dari berita yang berjudul 'Relawan Konser Dua Jari Kirim Surat Terbuka ke Jokowi'. *Republika* menyatakan bahwa rakyat Indonesia khususnya relawan konser dua jari akan turun ke jalan jika presiden Jokowi sebagai penerima mandat rakyat tidak membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Mereka juga menyampaikan dalam suratnya bahwa dukungan yang diberikan kepada

presiden Jokowi bukanlah cek kosong semata, tetapi dukungan tersebut karena adanya janji presiden terkait pemberantasan korupsi.

Sedangkan kurang bijaknya presiden dalam menyikapi kasus Budi Gunawan ini dapat dilihat dalam berita ‘Zaman SBY, Menteri Tersangka Dicapot. Lha Ini’. Dalam berita ini *Republika* menyampaikan kekecewaannya ketika presiden Jokowi tidak segera mencabut pencalonan Budi Gunawan ketika dinyatakan sebagai tersangka sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Hal ini kemudian dibandingkan dengan tindakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung memberhentikan menterinya ketika dinyatakan sebagai tersangka.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan analisis sebanyak tigabelas berita tentang Jokowi dalam kasus Budi Gunawan, Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka penulis berkeinginan memberi saran kepada pembaca dan peniliti selanjutnya. Untuk pembaca diharapkan mampu bersikap kritis dalam menelaah kalimat-kalimat berita agar tidak mudah terprovokasi dan untuk peniliti selanjutnya penulis tidak menyarankan untuk meneliti berita dari media online sebagai objek kajian. Sebab, media online yang sekarang banyak digandrungi oleh masyarakat ini ternyata tidak menyediakan informasi yang runut dan lengkap seperti media cetak. Media online kebanyakan hanya mengejar kecepatan dari pada ketepatan, sehingga berita yang dipublikasikan terkadang sulit untuk dipahami dan dianalisis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adriani Dwi, *Metode Penelitian*, Banten : Universitas Terbuka, Cet 8 Edisi 1, 2014.
- Assegaf Ja'far H, *Jurnalistik Masa Kini : Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Eka Ardhana Sutirman. *Jurnalistik Dakwah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, Dan Politik*. Yogyakarta : LKIS, 2002.
- Fajar Rosalina Indah, *Jurnalisme Damai Media Online Dalam Kasus Lurah Susan*. Yogyakarta. Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Shidiq Fatoni, *Berita ucapan natal di Republika Online (kajian isi berita melalui analisis framing)*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Sunan Kalijaga, 2015.
- Hakim luqman, *Frame Penolakan Terhadap Front Pembela Islam oleh Masyarakat Kalteng dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan Februari 2012*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah, Universitas Sunan Kalijaga, 2012.
- Hasfi Nurul, *analisis framing pemberitaan melinda dee di Detikcom, majalah Tempo dan Metro TV*. Yogyakarta : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2011.
- Herman Khaeron *Etika Politik : Paradigma Poltik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kusumaningrat Hikmat, *Jurnalistik : Teori Dan Praktik*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mahi Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta : LKIS, Cetakan I, 2007.

Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sumadiria AS Haris, *jurnalistik Indonesia menulis berita dan feature*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Winant Marcelino Casimirus, *Penerapan Kode Etik dalam Berita Kejahatan Susila (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila di Harian Umum Koran Merapi Periode Januari-Juni)*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya, 2012

Yunus Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Yustina Anggara, *penerapan kode etik jurnalistik Indonesia di harian Kalteng pos (analisis isi kuantitatif kode etik jurnalistik dalam judul dan body berita kekerasan terhadap perempuan pada rubrik Metrokrim harian Kalteng pos edisi januari – desember 2009)*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya, 2010

Yusuf Muhammad Khair Ramadhan, *Peran Media Informasi dalam Pengembangan Umat*, Pustaka Al-Kaustar, 1994

### Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/12/12565911/Pengamat.Penunjukan.Budi.Gunawan.sebagai.Calon.Kapolri.Dipaksakan> diakses pada 12 januari 2015 pukul 10.30 WIB

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/17/nia4wf-jokowi-tunda-pelantikan-jk-singgung-pemakzulan> diakses pada 12 september 2015 pukul 12:00

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/11/nhz56o-pilih-budi-gunawan-jokowi-bagibagi-kekuasaan> diakses pada 11 september pukul 12:19

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/03/nj75zt-jokowi-harus-segera-cari-tokoh-pengganti-bg> diakses pada 11 september 2015 12:31

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/04/nj899t-syafii-maarif-presiden-menyatakan-budi-gunawan-batal-dilantik> diakses pada 12 september 2015 pukul 11:55

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/11/nhz4mc-jokowi-angkat-bicara-soal-pengajuan-budi-gunawan> diakses pada 11 september pukul 13:05

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/12/ni21hg-keputusan-jokowi-soal-calon-kapolri-menuai-penolakan> diakses pada 12 september 2015 pukul 12:25

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/14/ni62tc-jokowi-paparkan-proses-pilih-budi-gunawan> diakses pada 12 september 2015 pukul 09:45

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/16/ni9v97-presiden-jokowi-ambil-langkah-bijak> diakses pada 12 september 2015 pukul 11:15

[http://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik\\_Online\\_-\\_Jurnalistik\\_Masa\\_Depan](http://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik_Online_-_Jurnalistik_Masa_Depan) diakses pada 29 April 2015 pukul 08:08

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/09/nhx5qc-budi-gunawan-ajudan-megawati-yang-bakal-jadi-kapolri> diakses pada tanggal 26 juni 2015 pukul 10.11

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/14/ni68rf-zaman-sby-menteri-tersangka-dicopot-lha-ini> diakses pada 12 september 2015 pukul 11:11

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/15/ni6zml-relawan-konser-dua-jari-kirim-surat-terbuka-ke-jokowi> diakses pada 11 september 2015 pukul 12:45

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/05/nj9jar-jokowi-malah-terlihat-seperti-presiden-boneka> diakses pada 17 Maret 2015 pukul 10:25

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/10/nhyk97-jokowi-benarkan-tunjuk-budi-gunawan-jadi-kapolri> diakses pada 11 september 2015 pukul 12:07

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/11/ni0lij-jokowi-tak-libatkan-kpk-dalam-seleksi-kapolri-ini-jawaban-istana> diakses pada 11 september pukul 15:01

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/11/ni0m69-pemilihan-kapolri-hak-prerogatif-presiden> diakses pada 11 september pukul 15:05

## **1. Personalia Redaksi Republika 2015**

Pimpinan Redaksi	: Nasihin Masha
Wakil Pimpinan Redaksi	: Irfan Junaidi
Redaktur Pelaksana Koran	: Subroto
Redaktur Pelaksana Newsroom	: Elba Damhuri
Redaktur Pelaksana Republika Online (Rol)	: Maman Sudiaman
Redaktur Senior	: Agung P Vazza
Wakil Redaktur Pelaksana	: Nur Hasan Murtiaji
	: Firkah Fansuri
	: S Kumara Dewatasari
	: Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana	: EH Ismail
	: Heri Ruslan
	: Mansyur Faqih
	: Priyantono Oemar
	: Stevy Maradona
	: Didi Purwadi
	: Djibril Muhammad

## **2. Redaktur**

### **1. Halaman 1**

- Ferry Kisihandi
- Fitriyan Zamzami

### **2. Nasional**

- M Hafild                      Nasional/Podium
- Syalabi Ihsan                Didaktika/Nusantara/Fokus Pub

- Andri Saubani            Nasional/Wawasan
- Erdy Nasrul              Urbana
- Endro Yuwanto          Urbana/What On

### 3. Olahraga

- M Akbar Wijaya        Bola/Arena
- Abdullah Sammy        Bola/Arena
- Fernan Rahardi         Rektor

### 4. Ekonomi

- Nuraini                    Makro/Finansial
- Irwan Kelana            Ekonomi Syariah/Bincang Bisnis/Pareto
- Nidia Zuraya            Mikro/Industri/Kreatipreneur/Pareto

### 5. Internasional

- Yeyen Rostiyani

### 6. Weekend

- Reiny Dwinanda        Gen-I
- Nina Chairani Ibrahim    Jelajah

### 7. Agama

- Wahidah Handasah      Khazanah/Iqro/Sains
- Andi Nur Aminah         Khazanah/Mozaik/Iqro/Sains
- Nashih Nasrullah        Islam Digest
- Hafidz Muftisany        Dialog Jum'at

### 8. Special Product (SP)

- Khoirul Azwar Siregar    SP/Lipsus
- Muhammad Iqbal         Majalah Mandiri
- Satya Festiyani          Majalah Mandiri

## 9. Rubrik Baru

- Setyanavidita Livikacavera   Innovasi
- Dewi Mardiani                    Sehat
- Natalia Endah Hapsari         Belanja

## 10. Foto

- Edwin Dwi Putranto (Kepala)
- Yogi Ardhi (redaktur)
- Musiron (wakil redaktur)

## 11. Newsroom

- Budi Rahardjo
- Ratna Puspita
- M. Fakhrudin
- Hiru Muhammad

## 12. ROL

- Teguh Firmansyah (mutasi koran)
- Indira Rezkisari
- Julkifli Marbun
- Citra Listya Rini
- Damanhuri Zuhri
- Bilal Ramadhan
- Hazliyansyah
- Israr Itah
- Yudha Manggala Putra
- Taufiqurrahman Bachdari
- Ichsan Emerald

- Indah Wulandari
- Agung Sasongko
- Angga Indrawan
- Ani Nursalikhah
- Dwi Murdaningsih
- Karta Raharaja Ucu
- Erik Purnama Putra
- Esthi Maharani
- M. Amin Madani (foto)
- Sadly Rahman (video)
- Ilham Tirta
- Winda Destiana
- Bayu Hermawan

#### 13. Reporter Senior

- Nurul S Hamami
- Selamat Ginting
- Harun Husein
- Muhammad Subarkah
- Siwi Tri Budiwiyati
- Rachmat Hadi Sucipto

#### 14. Editor Bahasa

#### 15. Desain/Infografis

- Sarjono (kepala desain)
- M Ali Imron (kepala Infografis)

#### 16. Digital Media

- Suherdi Riki

17. Jawa Barat

- Agus Yulianto (kepala redaksi)
- Friska Yolanda

18. DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur

- Yusuf Assidiq (kepala redaksi)
- Irfan Fitrat Pribadi

19. Social Media

- Zaky Al Hamzah

20. Sekertaris Redaksi

- Ida Hamidah (kepala sekertariat)



# Jokowi Benarkan Tunjuk Budi Gunawan Jadi Kapolri

Sabtu, 10 Januari 2015, 18:07 WIB

Rep: c74/ Red: Karta Raharja Ucu

Republika/Rakhmawaty La'lang



Presiden Jokowi bersepeda di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (4/12).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo membenarkan jika ia mengajukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Jokowi mengatakan surat ajuannya sudah diserahkan kepada DPR untuk melakukan verifikasi dan uji kelayakan.

"Yang jelas itu *kan* usulan Kopolnas sudah masuk, nama-nama itu. Ya sudah," kata Jokowi di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1).

Jokowi memastikan tidak ada yang salah soal usulan nama itu, bahkan nama Budi Gunawan termasuk dari usulan Kopolnas. Jenderal bintang tiga itu disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Jenderal Sutarman yang bakal pensiun Oktober 2015.

Sayangnya, Jokowi tidak berkomentar ketika ditanya terkait beredarnya surat usulan Budi menjadi Kapolri. Dalam surat yang beredar di kalangan media pada Jumat malam itu, Jokowi menulis penunjukan Budi didasarkan atas alasan kebutuhan organisasi dan proses regenerasi kepolisian.

Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Presiden Jokowi menilai Budi cukup cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kapolri.

Budi Gunawan adalah lulusan Akpol 83 dan merupakan lulusan terbaik peraih penghargaan Adhi Makayasa. Pada saat berpangkat Komisariss Besar (Kombes) Budi Gunawan pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004.

## **Jokowi tak Libatkan KPK dalam Seleksi Kapolri, Ini Jawaban Istana**

Ahad, 11 Januari 2015, 20:30 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Bayu Hermawan

123people.com



Andi Widjajanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarnan. Namun tak seperti saat memilih menteri, Jokowi tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Kapolri dipilih bukan berdasarkan mekanisme seleksi, tapi penunjukan langsung. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Sama halnya seperti pengangkatan duta besar, kepala staf angkatan, dan panglima TNI.

"Jadi presiden bisa tetapkan siapa saja yang dianggap pas untuk menduduki jabatan tersebut," ujarnya, Ahad (11/1).

Nama Budi Gunawan sendiri masuk dalam daftar nama-nama yang direkomendasikan Kompolnas pada Jokowi. Kemudian, Jokowi memilih Budi Gunawan, yang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai Kapolri baru.

Meski tak melibatkan KPK dan PPATK, ujar Andi, hal itu bukan berarti Jokowi melindungi Budi Gunawan, yang disebut-sebut salah satu jenderal pemilik rekening gendut.

"Presiden memepersilahkan KPK untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan Undang-Undang, serta akan menghormati dan mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Tidak ada pejabat yang kebal hukum," tegasnya.

## Pemilihan Kapolri Hak Prerogatif Presiden

Ahad, 11 Januari 2015, 20:44 WIB

Red: Mansyur Faqih

Republika/Wihdan



Komjen Pol. Budi Gunawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar antropologi politik, Subur Budhisantoso, menegaskan, rakyat harus menghargai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penentuan calon kapolri. Rakyat pun diminta mendukung pemilihan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Pol Sutarman.

"Pemilihan calon kapolri, itu hak prerogatif presiden. Rakyat harus bisa mengembalikan hak itu kepada presiden, dan bukan sebaliknya yang justru merebut hak presiden," kata Subur Budhisantoso, Ahad (11/1).

Menurutnya, tidal tepat jika ada yang berusaha memaksakan kehendak terkait pencalonan kapolri. Karena semuanya sudah ada aturan main dan semua pihak mengetahui aturan itu. "Kalau itu dilakukan, pasti bertentangan dengan perundangan yang berlaku," katanya.

Pada tahap ini,lanjutnya, presiden telah menggunakan hak prerogatif untuk memilih calon kapolri dan menyerahkannya kepada DPR. Tahapan selanjutnya, kewenangan ada di tangan parlemen untuk menjalankan *fit and propert test*.

"Kita percayakan (pemilihan calon kapolri) kepada presiden, karena itu memang hak prerogatif presiden. Sementara untuk *fit and propert test*, kita serahkan kepada DPR, karena itu memang tugas DPR," katanya

Dalam perundangan, papar dia, sudah jelas disebutkan kalau pemilihan kapolri adalah hak prerogatif presiden. Semua pihak harus menghargai itu dan tak perlu mendesak presiden agar dilibatkan dalam penentuan calon kapolri.

Ia pun menyatakan tak setuju jika ada yg mendesak untuk dilibatkan dalam proses fit and proper test kapolri. Karena, proses itu merupakan kewenangan para perwakilan rakyat yang duduk di Senayan. "Itu kan sama saja tidak percaya kepada DPR dan bahkan merebut kekuasaan."

Apalagi, tambahnya, kapasitas DPR dalam hal ini hanya memberi tanggapan atau penilaian terhadap calon yang diajukan presiden.

Mengenai keterlibatan KPK dan PPATK, ujar dia, dikhawatirkan malah akan memunculkan sistem 'barter'. Karena akan membuka peluang manipulasi.

Ia mengingatkan, sistem penggantian kapolri ini harus diatur lebih baik lagi. Sistem yang ada saat ini bisa menimbulkan rivalitas dan permusuhan antar kelompok di tubuh Polri sendiri.

"Siapa pun calon yang terpilih sebagai kapolri, akan selalu dimusuhi. Ini akan memecah Polri," katanya.

Menurutnya, intervensi berlebihan terhadap presiden dalam menentukan pilihan pejabat, terutama di kalangan TNI Polri, dapat mengancam soliditas internal dan *esprit de corp* dan ketahanan nasional yang harus dibina.

Kondisi ini dapat mengakibatkan rivalitas antar calon dan kelompok pendukung masing-masing dapat mengancam soliditas TNI Polri.

Ahad, 11 Januari 2015, 01:40 WIB

## Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi-Bagi Kekuasaan?

Rep: C07/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah

Republika/Wihdan Hidayat



Budi Gunawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef mengatakan ada indikasi kuat dipilihnya Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan karena dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Budi Gunawan dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarmanto.

“Kalau itu yang benar terjadi, maka publik berhak menagih janji kampanye Pak Jokowi yang tidak akan bagi-bagi kekuasaan setelah menduduki jabatan Presiden,” kata Nasef kepada Republika, Ahad (11/1).

Menurut Nasef salah satu kualifikasi paling penting untuk jabatan Kapolri adalah soal integritas. Integritas tersebut dapat dilihat dari rekam jejak calon.

Calon Kapolri, kata Nasef, tidak boleh memiliki rekam jejak yang buruk, seperti pernah terlibat korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Calon Kapolri harus dipastikan adalah orang yang benar-benar bersih.

Untuk itulah sebenarnya pelibatan KPK dan PPATK menjadi relevan dalam pemilihan Kapolri. "Apa jaminan Presiden Jokowi terhadap rekam jejak calon Kapolri Budi Gunawan yang diusulkannya ketika KPK dan PPATK tidak dilibatkan?" ucap Nasef.

Sikap Jokowi tersebut, sambung Nasef, justru menambah pesimisme publik terhadap **prospek** penegakan hukum di era Kabinet Kerja dengan memilih Kapolri yang rekam jejaknya belum terjamin.

“Kalau menggunakan logika hak prerogatif, maka kenapa dibeda-bedakan mekanisme pemilihannya antara Menteri, Hakim Konstitusi, dan Kapolri. Pengisian ketiga jabatan itu kan sama-sama hak prerogatif Presiden,”ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah memilih salah satu perwira tinggi Polri untuk dijadikan Kapolri, orang itu adalah Komjen Budi Gunawan. Nama Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut telah diusulkan oleh Jokowi kepada Ketua DPR RI dalam suratnya tertanggal (9/1).

Surat dengan kop Presiden Republik Indonesia tersebut ditandatangani sendiri oleh Jokowi dengan perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri menggantikan Kapolri saat ini Jenderal Polisi Sutarman.

Di dalam surat tersebut disebutkan Jokowi beranggapan bahwa Budi Gunawan mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri. Permintaan persetujuan ke DPR ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 2 tentang Kepolisian Negara.

“Kalau itu yang benar terjadi, maka publik berhak menagih janji kampanye Pak Jokowi yang tidak akan bagi-bagi kekuasaan setelah menduduki jabatan Presiden,” kata Nasef kepada Republika, Ahad (11/1).

Calon Kapolri, kata Nasef, tidak boleh memiliki rekam jejak yang buruk, seperti pernah terlibat korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Calon Kapolri harus dipastikan adalah orang yang benar-benar bersih.

Sikap Jokowi tersebut, sambung Nasef, justru menambah pesimisme publik terhadap prospek penegakan hukum di era Kabinet Kerja dengan memilih Kapolri yang rekam jejaknya belum terjamin.

Presiden Joko Widodo telah memilih salah satu perwira tinggi Polri untuk dijadikan Kapolri, orang itu adalah Komjen Budi Gunawan. Nama Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut telah diusulkan oleh Jokowi kepada Ketua DPR RI dalam suratnya tertanggal (9/1).

Surat dengan kop Presiden Republik Indonesia tersebut ditandatangani sendiri oleh Jokowi dengan perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri menggantikan Kapolri saat ini Jenderal Polisi Sutarman.

Di dalam surat tersebut disebutkan Jokowi beranggapan bahwa Budi Gunawan mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri. Permintaan persetujuan ke DPR ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 2 tentang Kepolisian Negara.

Ahad, 11 Januari 2015, 05:35 WIB

## Jokowi Angkat Bicara Soal Pengajuan Budi Gunawan

Red: Citra Listya Rini

Antara/Andhika Wahyu



Presiden Joko Widodo

Minggu, 11 Januari 2015, 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

"Sudah dari Kompolnas, hak prerogatif saya, saya pakai pilihan saya, (kemudian) saya sampaikan ke dewan," kata Jokowi disela-sela peninjauan galangan Kapal PT PAL di Surabaya, Sabtu (10/1) malam.

Jokowi mengatakan pilihan pemerintah yang diajukan kepada DPR RI sudah melalui proses yang benar.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan dari usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ada sembilan nama yang memenuhi syarat.

"Sembilan nama itu sudah diserahkan Menko Polhukam sebagai ketua Kompolnas Hari Jumat (9/1) pagi sebelum rapat terbatas tentang KAA," ujar Andi.

Presiden Jokowi, kata Seskab, kemudian memanggil Mensesneg Pratikno untuk menyiapkan surat pengajuan usulan nama calon Kapolri kepada DPR RI.

"Jadi kami, baik Mensesneg, saya sebagai Seskab, kalau hal-hal seperti ini tidak menanyakan alasan Presiden karena ini adalah hak prerogatif Presiden," katanya.

Andi mengatakan pengajuan calon tunggal dan tidak melibatkan PPATK dan KPK karena memang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang.

Ia menambahkan mengenai adanya informasi rekening gendut perwira kepolisian, itu sudah ada sejak 2008 dan 2010, namun selama ini kasus tersebut seperti tidak pernah dialami.

"Pertanyaannya, kalau seandainya ada A,B,C di Kepolisian atau lembaga institusi lain yang terindikasi memiliki masalah tentang aliran **finansialnya** kenapa dari 2008, 2010 dari lima tahun lalu tidak ada tindakan," kata Andi.

Andi menambahkan, "Presiden tentu melakukan klarifikasi ke institusi Polri tentang ini. Saya yakin klarifikasinya positif sehingga Presiden mengusulkan Pak Budi Gunawan."

Senin, 12 Januari 2015, 15:12 WIB

## Keputusan Jokowi Soal Calon Kapolri Menuai Penolakan

Red: Muhammad Fakhruddin



Dari kiri Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, peneliti ICW Emerson Yuntho, Lola Easter, dan Aradila Caesar menutup mata dengan kain hitam bertuliskan Kapolri di Jakarta, Ahad (11/1). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarmanto. Presiden telah mengirimkan surat penunjukan Budi Gunawan kepada DPR untuk meminta persetujuan.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri telah *memicu* pro dan kontra. Penolakan terhadap keputusan DPR itu tidak hanya muncul dari LSM yang selama ini konsen terhadap pemberantasan korupsi, juga dari sejumlah aktivis yang selama ini mendukung Jokowi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal sudah mengingatkan agar KPK dan PPATK dilibatkan dalam pemilihan kapolri baru. Koalisi Masyarakat Sipil telah mengingatkan Presiden Jokowi agar tak melangkahi kedua lembaga tersebut seperti saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Wakil Koordinator ICW, Agus Suraniyanto menegaskan, KPK dan PPATK ahli dalam mengurus rekening yang mencurigakan. "Jokowi jangan takut," ujarnya dalam jumpa pers bersama KMS di kantor ICW akhir pekan lalu.

Presiden Jokowi membenarkan telah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Aktivis ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil langsung bergerak mendatangi KPK.

Mereka meminta kejelasan soal calon kapolri tersebut. Karena Budi Gunawan *diindikasikan* memiliki rekening mencurigakan alias rekening gendut.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, pihaknya tidak dilibatkan Presiden Jokowi dalam penentuan calon kapolri.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho pun melontarkan kritik tajam kepada presiden. ICW menduga presiden sengaja tak melibatkan KPK-PPATK karena khawatir *jagoannya* tersebut tidak lolos.

Emerson menilai, Jokowi telah melanggar janjinya sendiri. Saat masa kampanye, Jokowi mengusung program 'Nawacita' (sembilan cita-cita), yaitu berkomitmen akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas dan bersih.

Faktanya, kata Emerson, Jokowi tidak menjalani proses penjaringan itu melalui KPK dan PPATK. "Kami menyerukan seluruh warga Indonesia menolak langkah Jokowi yang terburu-buru mengirimkan nama calon kapolri ke DPR," tegas Emerson dalam jumpa pers pada Ahad (11/1) di Warung Daun, Jakarta bersama KMS.

Dalam jumpa pers itu, mereka melakukan aksi tutup mata menggunakan kain warna hitam bertuliskan 'Kapolri' sebagai simbol Presiden tutup mata dalam menentukan orang nomor satu di tubuh Polri.

Kritik juga dilontarkan mantan kepala PPATK Yunus Husein. Ia mempertanyakan alasan Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Karena, nama Budi Gunawan pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus.

"Mengapa presiden masih mencalonkan yang bersangkutan sebagai calon KAPOLRI ? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat Presiden/Pem & POLRI," cetus Yunus Husein lewat akun Twitternya.

Lantas beredar dugaan di publik bahwa penunjukan Budi Gunawan ini sebenarnya bukan berasal dari Presiden Jokowi. Tapi diduga masukan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikenal dekat dengan Budi Gunawan. "Akhirnya Budi Gunawan jadi Kapolri. Ini bukan kemauan Jokowi, tapi paksaan Megawati," kicau Ulin Yusron, aktivis yang juga pendukung Jokowi saat kampanye dulu.

# Jokowi Paparkan Proses Pilih Budi Gunawan

Wednesday, 14 January 2015, 19:32 WIB



Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1). (Republika/Agung Supriyanto)

[A+](#) | [Reset](#) | [A-](#)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers pada Rabu (14/1) untuk menanggapi pencalonan kepala Polri (kapolri) Komjen Budi Gunawan. Ia menegaskan menunggu putusan sidang paripurna DPR.

Ia pun memaparkan tahapan dan proses pencalonan Kapolri. Ia menegaskan tahapan prosedur telah dilalui oleh pemerintah dari beberapa pekan sebelumnya. Kemudian, ada usulan dari Kopolnas.

Usulan pertama dari kopolnas, ada sembilan perwira tinggi polri. Usulan atau opsi kedua dari kopolnas empat petinggi polri bintang tiga.

Setelah usulan itu, ia mengaku memilih satu orang yakni Komjen Budi Gunawan. Secara lebih detail, Jokowi mengaku bertanya langsung kepada Kopolnas mengenai kabar dan dugaan mengenai rekening mencurigakan.

"Saya juga dapatkan surat klarifikasi mengenai rekening dan di sini disampaikan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. ini saya pegang," katanya sambil menunjukkan surat dari Kompolnas.

Mendapatkan klarifikasi dan penjelasan resmi dari Kompolnas, Jokowi merasa mantap dan langsung membuat surat yang ditujukan kepada DPR.

Dalam proses tersebut, KPK lalu menetapkan Budi Gunawan yang tak lain calon tunggal Kapolri sebagai tersangka rekening mencurigakan. Karena itu, ia menegaskan menghormati proses hukum dan proses politik yang sedang berlangsung atas nama Budi Gunawan.

Pada Selasa (13/1) ia pun mengaku kembali mendapatkan usulan dan pendapat dari Kompolnas. Namun, ia menegaskan akan menunggu hasil kebijakan dari DPR.

"Sampai saat ini saya masih menunggu, gak tahu paripurna di dewan kapan, setelah itu baru akan kita putusan kebijakan apa yang akan kita ambil," katanya.

## 'Zaman SBY, Menteri Tersangka Dicapot. Lha Ini?'

Thursday, 15 January 2015, 06:36 WIB



Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1). (Republika/Agung Supriyanto)

[A+](#) | [Reset](#) | [A-](#)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Saldi Isra menilai kontroversi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menjadi **bom waktu** bagi Presiden Joko Widodo.

Ia menilai seharusnya lebih mudah bagi Jokowi untuk segera mencabut surat pengajuan calon tunggal kapolri dari DPR. Terlebih lagi, KPK sudah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sebelum uji kelayakan dan kepatutan di DPR dilakukan.

"Pengumuman status tersangka kan kemarin jam dua siang. Presiden mestinya masih punya waktu untuk mencabut surat pengajuannya. DPR pun tidak perlu melanjutkan proses berikutnya," kata Saldi, Rabu (14/1).

Saldi pun membandingkan tindakan Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Ia ingat ketika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung '**dipaksa**' mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya.

"Di zaman SBY menteri tersangka korupsi **dicabut** dari jabatannya. Lha ini kan jadi saja belum. Baru pencalonan, kok tidak dicabut. Harusnya kan lebih mudah," papar Saldi.

Di masa SBY, ada tiga menteri aktif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng, Menteri Agama, Suryadharma Alie, dan Menteri ESDM, Jero Wacik. Setelah penetapan sebagai tersangka, mereka pun dicopot dari jabatannya.

# Relawan Konser Dua Jari Kirim Surat Terbuka ke Jokowi

Thursday, 15 January 2015, 07:20 WIB

Republika/Agung Supriyanto



Calon Kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

[A+](#) | [Reset](#) | [A-](#)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para relawan yang mendukung Presiden Jokowi memberikan peringatan agar proses pencalonan kepala Polri tidak dilanjutkan. Mereka, di antaranya relawan yang mengadakan Konser Salam Dua Jari, sangat gelisah dengan keputusan Jokowi yang tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Sutarmanto.

Berikut surat terbuka mereka para relawan.

*Yang Terhormat Bapak Presiden,*

*Perkenankanlah kami, relawan yang selama ini mendukung Bapak Presiden untuk sebuah gerakan Revolusi Mental demi Indonesia yang lebih baik, menyampaikan suara hati kami sehubungan dengan disetujuinya pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia oleh DPR RI.*

*Kami merasa gelisah karena pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah **menafikan***

*penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi.*

*Karena itu, kami meminta Bapak selaku penerima mandat rakyat agar mencabut/membatalkan pencalonan Komjen (Pol) sebagai Kapolri RI.*

*Kami sadar, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Bapak sebagai Presiden. Namun, kami juga berharap agar sosok Kapolri adalah sosok yang beintegritas dan punya rekam jejak yang baik.*

*Perlu kami ingatkan bahwa dukungan kami bukan merupakan cek kosong. Kami mendukung dan memilih Bapak, karena kami percaya Bapak akan memenuhi janji dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia yang Bapak sampaikan ketika kampanye.*

*KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, kami himbau Bapak Presiden menghormati keputusan tersebut sebagai wujud janji bapak saat kampanye bahwa tidak akan memilih pejabat negara yang bermasalah dengan hukum.*

*Jika bapak tidak mencabut pencalonan Kapolri, melalui surat ini, kami sebagai relawan Konser Salam 2 Jari menyatakan akan turun ke jalan dan meminta KPK segera menuntaskan kasus pidana di balik rekening gendut.*

*Kami percaya bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden pilihan kami akan mendengarkan dengan hati dan tidak semata hanya dengan telinga.*

*Kami gelisah, karena tidak mampu meyakinkan Bapak untuk menarik kembali pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Namun, kami percaya, Bapak masih punya hati untuk mendengarkan suara kami.*

*Relawan Konser Salam Dua Jari*

*Abdee Negara - Oppie Andaresta - Nia Dinata - Fifi Hadiyanto - Olga Lydia – Jflow - Catharina Widyasrini - Andre Opa Sumual - Adib Hidayat - Joko Anwar – Shafiq Pontoh - Ulin Yusron - Kadri Jimmo - Happy Salma - Indra Bkti - Salman Aristo - Dira Sugandi - Viddy Supit - Upi - Goenawan Moehammad - Agus Noor - Tompi - Sandyawan Sumardi - Alin Adita - Fadjroel Rachman - Glenn Fredly*

# Presiden Jokowi Ambil Langkah Bijak

Friday, 16 January 2015, 20:39 WIB

Republika/Rakhmawaty La'lang



Presiden Jokowi bersepeda di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (4/12).

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi dinilai mengambil langkah bijak terkait penentuan Kapolri. Di saat calon yang diusulkan, Komjen Budi Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Jokowi kemudian menunda pengangkatan Kapolri.

Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) bersama Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menyatakan sikap mendukung Presiden Jokowi agar mengambil langkah yang bijak terkait pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan.

"Kita harus realistis, situasi kita memang demikian parah. Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak serta-merta menghilangkan korupsi. Jika kita berkesimpulan membutuhkan KPK, itu artinya mengakui birokrasi kita belum bersih, maka tidak fair kalau lantas menghakimi Jokowi," kata Ketua Umum BaraJP, Sihol Manulang melalui siaran pers, Jumat (16/1).

Sementara itu Ketua Presidium Seknas, Moh Yamin menambahkan bahwa Jokowi hanya melaksanakan haknya sebagai presiden untuk memilih salah satu dari sejumlah nama yang disodorkan KOMPOLNAS, yang kemudian meminta persetujuan DPR. Prosedur telah dilaksanakan, DPR menyetujui.

"Kami hanya mendukung dan membentengi Jokowi agar mengambil putusan terbaik, bukan soal mendukung siapa yang menjadi Kapolri. Opsi melantik Budi Gunawan, lantas kemudian diberhentikan, atau tidak dilantik, merupakan opsi yang tentu sudah dipikirkan Jokowi," imbuh Muhammad Yamin.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai meminta agar Jokowi bersikap menghormati kedua institusi yakni KPK yang telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dan DPR yang telah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri "Sikap presiden ini penting untuk menjaga marwah baik institusi Kepresidenan, lembaga legislatif maupun juga KPK sebagai lembaga penegak hukum,"kata Natalius Pigai.

## Jokowi Tunda Pelantikan, JK Singgung Pemakzulan

Sabtu, 17 Januari 2015, 00:40 WIB



Wapres Jusuf Kalla (kanan).

[A+](#) | [Reset](#) | [A-](#)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Jokowi telah menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI pada malam ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyinggung langkah yang telah diambil pemerintah ini memiliki berbagai macam resiko,

termasuk resiko pemakzulan terhadap pemerintah.

Pernyataannya ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara 'Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015' yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (16/1) malam. Saat itu, JK datang terlambat lantaran turut mendampingi presiden memberikan keterangan pers terkait penundaan pelantikan calon Kapolri.

"Saya tadi telat seperti yang dikatakan saudara Sofyan, pemerintah itu mengambil keputusan yang tepat kalau pun risikonya harus ditanggung oleh keputusan itu. Kenapa telat, karena baru pulang bersama presiden mengambil keputusan yang begitu banyak variasi risikonya. Risiko politik, risiko hukum, risiko sosial. Malah ada yang berpikir mau impeach (pemakzulan) pemerintah. Tapi kita putuskan semua. Nanti lah kita lihat risikonya. Kita selesaikan risikonya," jelas JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan penundaan terhadap pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan penundaan perlu dilakukan karena Budi Gunawan tengah menjalani proses hukum.

Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun begitu, Budi tetap menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Komisi III dan Paripurna menyetujui Budi Gunawan diangkat sebagai Kapolri baru.

## Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG

Selasa, 03 Februari 2015, 20:11 WIB



Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Hingga saat ini Jokowi belum memutuskan apakah jadi melantik Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri atau tidak. Menurut para akademisi, solusi yang terbaik bagi Jokowi adalah mencari tokoh alternatif yang bisa diterima PDIP maupun diterima publik

Agung Baskoro, Peneliti dari Pol Tracking Institute menyatakan saat ini posisi Jokowi berada ditengah dari dua kelompok yang berkepentingan pada pencalonan BG. Kelompok yang pertama, kata dia, adalah PDI Perjuangan yang ngotot Budi Gunawan tetap jadi Kapolri. Sedangkan kelompok yang kedua yakni publik ingin agar BG tak dilantik menjadi Kapolri. “Diantara dua pilihan itu semuanya memiliki resiko politik besar bagi Jokowi,” kata dia, Selasa (3/2).

Dia menyebutkan jika Jokowi membatalkan pelantikan BG, PDIP selaku partai pengusung Jokowi akan terusik dengan langkah ini. Hal ini, kata dia, bisa mengakibatkan posisi Jokowi di parlemen menjadi tidak aman. “Bisa bisa KIH menjadi penghambat Jokowi di parlemen,”

ujarnya.

Begitu juga sebaliknya semisal Jokowi tetap melantik BG menjadi Kapolri, hal ini akan membuat publik menjadi kecewa. hal ini, kata dia, bisa berefek pada elektabilitas Jokowi di mata masyarakat. “ Soalnya dulu kan Jokowi bilang akan komitmen pada pemberantasan korupsi sewaktu kampanye,” kata dia.

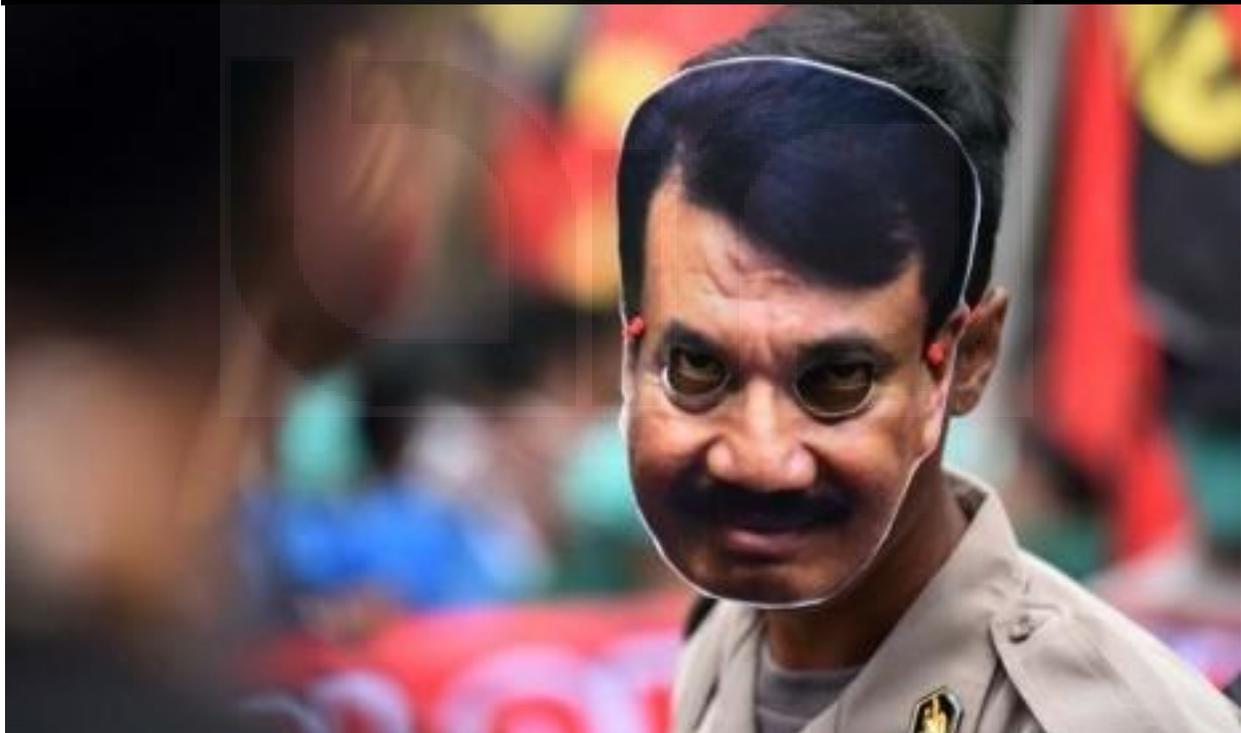
Penundaan pelantikan BG menjadi Kapolri berawal dari penetapan tersangka pada dirinya yang dilakukan oleh KPK. BG diduga terlibat dalam kasus rekening gendut menurut penyelidikan oleh KPK.

Yang membuat dilematis adalah BG sudah lulus fit and proper test yang dilakukan oleh DPR RI. Sehingga berdasarkan konstitusi, presiden harus segera melantik BG menjadi Kapolri. Meski seperti itu di arus bawah masyarakat menyurakan agar BG tidak dilantik menjadi Kapolri. Hal inilah yang membuat Jokowi dilematis dan belum kunjung melantik BG hingga saat ini.

## **Syafii Maarif: Presiden Menyatakan Budi Gunawan Batal Dilantik**

Rabu, 04 Februari 2015, 10:20 WIB

ANTARA/Hafidz Mubarak A



Pengunjukrasa dari berbagai aliansi berunjukrasa sebelum dimulainya sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (2/2). (ANTARA/Hafidz Mubarak A).

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Koordinator tim Sembilan Syafii Maarif mengatakan, calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) batal dilantik oleh presiden. Hal itu disampaikan Syafii sebelum masuk ruangan seminar Pra Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (4/2).

"Pak Presiden sudah telpon saya kalo BG batal dilantik sesuai rekomendasi tim" ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah iu sambil masuk ruangan seminar.

Pernyataan Syafii tersebut menjawab pertanyaan wartawan apakah BG jadi dilantik atau tidak oleh presiden. Tim Sembilan sendiri merupakan tim independen yang dibentuk presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan dan telaah terkait kasus yang melanda KPK dan Polri usai penetapan tersangka BG oleh KPK.

Tim Sembilan sebelumnya memberikan rekomendasi ke presiden agar BG tidak dilantik sebagai Kapolri meskipun sebagai calon tunggal.

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatus Sukriya  
NIM : 1121066  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Yang menyatakan



Nailatus Sukriya

NIM. 11210066

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nailatus Sukriya  
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 06 Januari 1992  
Alamat : Simbar, Tampo, Cluring, Banyuwangi  
Nama Ayah : Imam Qurtubi  
Nama Ibu : Sulimah  
No. HP : 089683801280  
Email : naylaqurtubi@gmail.com

### B. Riwayat pendidikan

#### 1. Pendidikan formal

- a. MI Tarbiyatus Sibyan, Lulus Tahun : 2004
- b. MTS N Cluring Banyuwangi, Lulus Tahun : 2007
- c. MAN Denanyar Jombang, Lulus Tahun : 2010
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus Tahun : 2016

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Hidayah
- b. Madrasah Diniyah Mamba'ul Ma'arif

### C. Pengalaman Organisasi

1. RASIDA FM
2. UKM JQH Al-Mizan
3. Ikapmam Jogja
4. Munadhomatut Thullab Madrasah Diniyah Mamba'ul Ma'arif
5. Jam'iyah Qubro Yayasan Mamba'ul Ma'arif

Yogyakarta, 21 Januari 2016

Nailatus Sukriya